

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN SEBAGAI TANTANGAN PENDIDIKAN UNTUK PENGEMBANGAN MASYARAT INDONESIA

Oleh:

Novita Delima Putri¹⁾

E-mail: novita111100@yahoo.com

¹⁾ Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

ABSTRACT

Entrepreneurship is one answer to the gap between the growth of the productive population with job availability. On the other hand understanding of and interest in entrepreneurship in Indonesia is still very low, even the number of entrepreneurs in Indonesia is still below 2%.

The education required to be able to print a generation that has the independence, including economic independence with the ability to meet the needs of later life, but education alone cannot provide assurance that all the students will be absorbed in the workplace.

School, the campus also other informal educational media not only serves to share science with theories - theories and skills to practice - practice. But if it is associated with is the lack of understanding and interest about the world of entrepreneurship, the world of education can be used also as a medium of information to increasing understanding and interest of their students to the world of entrepreneurship.

By using the data - as well as secondary data and related literature review, conceptual following paper will describe the relationship of education to the development of the entrepreneurial world and is expected to give an idea that the need for understanding and interest in entrepreneurship through both formal and informal education.

Keywords: *Entrepreneurship, education, interest and understanding.*

PENDAHULUAN

Permasalahan ketenagakerjaan secara langsung maupun tidak langsung salah satunya adalah karena meningkatnya jumlah angkatan kerja dalam waktu yang cepat dan jumlah yang tinggi, sementara kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas akan menyebabkan timbulnya pengangguran. Hal ini akan berkaitan dengan masalah - masalah lainnya seperti ketidakmerataan pendapatan, kemiskinan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan instabilitas politik.

Semua ini secara intuitif tampaknya telah dipahami oleh para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran yang berimplikasi terhadap

lambatnya laju pertumbuhan ekonomi, mengingat semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja baru yang memasuki pasar kerja. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap bidang wirausaha. Melalui penggalakan pendidikan kewirausahaan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat, dengan meningkatnya jumlah wirausaha di Indonesia akan dapat mengurangi jumlah pengangguran dan permasalahan terkait hal tersebut. Salah satu bentuk sosialisasi tentang kewirausahaan dilakukan melalui sektor pendidikan.

Dengan melakukan kajian terhadap peraturan dan kebijakan terkait kewirausahaan dan perkembangan pendidikan di Indonesia serta fakta – fakta yang berasal dari data sekunder yang berasal dari instansi terkait, tulisan ini diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran tentang pentingnya sebuah pendidikan kewirausahaan di Indonesia.

KAJIAN AKADEMISI

Empirisme Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia

Besarnya penduduk usia produktif yang tidak disesuaikan dengan besarnya serapan tenaga kerja merupakan permasalahan yang hampir terjadi di setiap negara terutama negara berkembang termasuk didalamnya adalah negara Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2000 – 2010 mencapai 1,49 secara umum berpengaruh terhadap jumlah penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja mengalami peningkatan terus menerus bahkan hingga mencapai 175 juta jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa pada tahun 2012.

Table 1. Penduduk Berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan

Jenis Kegiatan	Februari 2012	Agustus 2012	Februari 2013
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas	172 865 970	173 926 703	175 098 712
Angkatan Kerja	120 417 046	118 053 110	121 191 712
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,66	67,88	69,21
b. Bekerja	112 802 805	110 808 154	114 021 189
c. Pengangguran Terbuka *)	7 614 241	7 244 956	7 170 523
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,32	6,14	5,92
Bukan Angkatan Kerja	52 448 924	55 873 593	53 907 000
a. Sekolah	14 307 802	14 084 633	14 971 720
b. Mengurus Rumah Tangga	31 447 888	33 628 814	32 185 937
c. Lainnya	6 693 234	8 160 146	6 749 343

Sumber : BPS

Sebuah kenyataan bahwa sebanyak 7,1 juta penduduk Indonesia pada februari tahun 2013 tercatat sebagai pengangguran terbuka atau sebanyak 5,92 persen. Walau mengalami penurunan secara jumlah dimana tahun sebelumnya pengangguran terbuka sebanyak 7,6 juta pada februari tahun 2013 dan 7,2 juta pada agustus 2013, tetapi jumlah pengangguran terbuka

yang cukup besar akan memberi dampak baik secara sosial maupun secara ekonomi baik. (Anata, 2013; Susetyo dan Amanda, 2011)

Perkembangan UMKM di Indonesia

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan penggerak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkembangan UMKM yang baik maka akan membawa kemajuan bagi perekonomian suatu negara.

Pada tahun akhir tahun 2010 diperkirakan ada sekitar 53.823.732 UMKM (98,85 %) dari seluruh usaha di Indonesia. Kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja sekitar 97,22% dan sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 57,83%. Mengingat keberadaan UMKM dan perannya sangat besar dalam perekonomian Indonesia, maka diperlukan pemerdayaan UMKM.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah wirausaha per Januari 2012 mencapai 3,75 juta orang atau 1,56 persen dari total penduduk Indonesia. Pada 2010, tercatat masih 0,24 persen. Namun angka ini masih kalah jauh dibanding negara Asia lain, seperti Cina dan Jepang, yang memiliki wirausaha lebih dari 10 persen jumlah populasi. Di regional Asia Tenggara, Indonesia masih kalah dibanding Malaysia (5 persen) atau Singapura (7 persen). Minimnya jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai mengancam ketahanan perekonomian nasional. Kondisi ekonomi menjadi kurang sehat terhadap ancaman krisis.

Usaha peningkatan jumlah UMKM dilakukan dengan mendorong program-program pengembangan wirausaha. Program penciptaan wirausaha yang diusung Kemenkop dan UKM. Seperti Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Indonesia pada tahun 2011, telah mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wirausaha Indonesia, mengingat jumlah wirausaha Indonesia baru berkisar 0,24% dari populasi penduduk. Diharapkan dengan GKN dapat mencapai sekurang-kurangnya 1% dari populasi penduduk Indonesia pada tahun 2014 dan akhirnya mencapai rasio ideal 2% dari populasi penduduk.

Untuk itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan serangkaian kebijakan dan rencana aksi untuk mendukung program-program peningkatan kualitas dan kuantitas kewirausahaan di Indonesia, agar mampu menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang tangguh menghadapi krisis ekonomi global, sekaligus solusi mengurangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

GKN merupakan salah bentuk konkrit sebagai wujud kesungguhan Pemerintah RI untuk memasyarakatkan kewirausahaan kepada masyarakat luas. Presiden RI dalam berbagai kesempatan telah menekankan pentingnya mengembangkan kewirausahaan, terutama kalangan kaum muda dan kaum terdidik di Indonesia.

Sebagai sebuah gerakan kinerja, GKN sepanjang 2012 telah menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan. Pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan jumlah wirausaha baru yang semula 570.339 orang pada 2011 (0,24 %) menjadi 3.707.205 orang (1,56 %) pada akhir 2012.

Peningkatan rasio jumlah wirausaha terhadap jumlah populasi Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing untuk berkompetisi dengan negara lain. Sebagai

perbandingan, Singapura memiliki wirausaha 7,2 %, Malaysia 2,1 %, Thailand 4,1 %, Korea Selatan 4,0 %, dan Amerika Serikat 11,5 % dari seluruh populasi penduduknya.

GKN juga diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai sasaran kinerja KIB II, yang mentargetkan turunnya tingkat pengangguran dari 7% pada tahun 2011 menjadi 5–6% pada tahun 2014, kemudian pertumbuhan ekonomi dari 6,55 pada tahun 2011 menjadi 7,7% pada tahun 2014 dan kemiskinan turun dari 12,5 % menjadi 8–10% pada tahun 2014. Dibutuhkan usaha yang cukup keras dan kesinergian antar semua pemegang kepentingan untuk memajukan sektor UMKM di Indonesia.

Gambaran Pendidikan di Indonesia

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Hingga saat ini masalah pendidikan masih menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Pasalnya Indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua atau *education for all* (EFA) di Indonesia menurun tiap tahunnya. Tahun 2011 Indonesia berada diperingkat 69 dari 127 negara dan merosot dibandingkan tahun 2010 yang berada pada posisi 65. Indeks yang dikeluarkan pada tahun 2011 oleh UNESCO ini lebih rendah dibandingkan Brunei Darussalam (34), serta terpaut empat peringkat dari Malaysia (65).

Pendidikan merupakan hal penting bagi agenda pembangunan Pemerintah Indonesia. Belanja pendidikan telah meningkat secara signifikan di tahun-tahun terakhir setelah terjadinya krisis ekonomi. Secara nyata, belanja pendidikan meningkat dua kali dari tahun 2000 sampai 2006. Di tahun 2007, belanja untuk pendidikan lebih besar daripada sektor lain, yang mencapai nilai US\$14 miliar, atau lebih dari 16 persen dari total pengeluaran pemerintah. Sebagai bagian dari PDB (3,4 persen), jumlah ini setara dengan jumlah di negara lain yang sebanding (Kemendiknas).

Table 3. Data pendidikan penduduk 15 tahun ke atas

Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun ke Atas	Tahun 2011	Tahun 2013
Tidak/belum sekolah	6,41	5,88
Tidak tamat SD	14,69	13,90
SD/ sederajat	28,72	28,09
SMP/ sederajat	20,74	21,00
SM +/ sederajat	29,44	31,13

Sumber
: BPS Indonesia

Membangun keutuhan bangsa melalui pendidikan dilakukan melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Esensi mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi domain utama pendidikan adalah membangun bangsa Indonesia yang berakar pada budaya dengan segala keragamannya untuk menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, demokratis, berakarakter, mandiri, berdaya saing, dan berdaya tahan kuat di dalam percaturan hidup antar bangsa yang ditopang oleh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terarah kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. (Kartadinata, 2009).

Kecerdasan kehidupan bangsa bukan agregasi kecerdasan perorangan, karakter bangsa bukan agregasi karakter perorangan; kecerdasan dan karakter bangsa mengandung perekat kultural; kecerdasan bangsa adalah kecerdasan kultural yang akan membangun karakter bangsa dalam harmoni dan perdamaian.

Selain itu kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur pendidikan sebagai pendukung yang meliputi aspek – aspek teknologi, sumber daya manusia maupun birokrasi pengelolaan. Untuk meningkatkan kualitas infratutuktur pendidikan sehingga dapat memebri dampak positif bagi kualitas pendidikan di Indonesia, maka setiap *stakeholder* ditantang untuk dapat meningkatkan kinerja dan melakukan kinerjanya (Soewardi dan Wirahadikusumah (2012)).

Pendidikan Kewirausahaan di Indonesia

Pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pengembangan manusia harus dilakukan secara utuh, yang mencakup pengembangan daya pikir, daya *qolbu*, daya fisik, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olahraga (Slamet, 2011). Selain itu, pengembangan manusia juga diharapkan menghasilkan manusia yang mampu dan sanggup berperan aktif dalam membangun masyarakat Indonesia seluruhnya. Tugas sektor pendidikan baik formal maupun informal bukan hanya mencetak manusia – manusia yang berpendidikan, tetapi secara lebih luas lagi, sektor pendidikan harus mampu menciptakan manusia – manusia yang mandiri. Dengan kenyataan bahwa tidak semua penduduk Indonesia usia produktif dan tergolong sebagai angkatan kerja dapat terserap didunia kerja, maka sektor pendidikan bertanggungjawab untuk mencari solusi, bagaimana agar output yang dihasilkan tidak hanya berorientasi untuk menjadi pekerja, disisi peran sektor pendidikan untuk memperkenalkan dan memotivasi anak didiknya agar memahami bahwa selain menjadi seorang pekerja ternyata bidang wirausaha juga menjadi bidang yang cukup menjanjikan untuk didalami.

PENUTUP

Sebuah kenyataan bahwa sulitnya mencari kerja dan tidak seimbangnya antara pertumbuhan penduduk usia produktif dengan pertumbuhan dunia usaha yang mempengaruhi jumlah serapan tenaga kerja. Hal ini menciptakan sebuah tantang baru bagi semua stakeholder untuk bersama – sama dapat berangkat dari permasalahan tersebut.

Terkait dengan fungsi dan peranan dunia pendidikan berkewajiban untuk dapat mencetak generasi – generasi yang memiliki kemandirian, termasuk kemandirian secara ekonomi dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kelak, tetapi dunia pendidikan sendiri tidak dapat memberikan jaminan bahwa semua anak didiknya akan terserap didunia kerja.

Sebuah tantangan baru bagi dunia pendidikan, bagaimana dunia pendidikan bukan hanya mampu menciptakan manusia yang berpendidikan tetapi juga mampu mencetak manusia – manusia yang mandiri untuk menjawab tantangan jaman. Sekolah, kampus juga media pendidikan informal lainnya bukan hanya berfungsi untuk berbagi ilmu dengan teori – teorinya maupun ketrampilan dengan praktek – prakteknya. Tetapi jika dikaitkan dengan masih rendahnya pemahaman dan minat tentang dunia wirausaha, dunia pendidikan dapat difungsikan juga sebagai media informasi untuk meningkatkan pemahaman dan minat anak didiknya pada dunia kewirausahaa. Diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan serta minat

generasi muda terhadap bidang kewirausahaan, maka Indonesia dapat terlepas dari permasalahan sosial seperti pengangguran dan rendahnya pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anata, Firdaus. 2013. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk dan Index Williamson terhadap Tingkat Kriminalitas (Studi pada 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2012), *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Brawijaya, Malang.

Kartadinata, Sunaryo. 2009. *Membangun Keutuhan Bangsa melalui Pendidikan dalam Bingkai Utuh Sistem Pendidikan Nasional*. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Susetyo, Heru dan Amanda,Putri Kusuma, 2011, *Dampak Kependudukan Terhadap Kriminalitas dan Keamanan Individu*, Ditdamduk BKKBN 2011.

Slamet, PH (2011). Peran Pendidikan Vokasi dalam Pembangunan Ekonomi, *Cakrawala Pendidikan*, Juni 2011, Th. XXX, No. 2.

Soewardi, Biemo W dan Wirahadikusumah, Reini D, 2012, Kebutuhan dan Tantangan Pendidikan Infrastruktur, Seminar Nasional Pembangunan Infrastruktur Untuk Semua, Kerjasama Tiga Universitas, UI-UGM-ITB.

www.bps.go.id

www.kemennakertrans.go.id